

Optimalisasi Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah Melalui Pendampingan Distribusi Beras oleh Perum Bulog Kantor Cabang Lubuk Linggau

Optimizing the Affordable Food Movement through Assistance in Rice Distribution by Perum BULOG Lubuk Linggau Branch Office

Yayuk Marliza¹, Suharto², Miki Indika³, Anggia Syafitri⁴, Ryan Octavianie⁵, Dina Nellysa⁶, Ayu Pasma Linda⁷

Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Musi Rawas

*Email Korespondensi : marlizayayuk77@gmail.com

Abstrak

Stabilitas harga dan ketersediaan beras merupakan aspek penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap pangan, sehingga efektivitas distribusi, ketepatan administrasi, dan pengendalian stok menjadi bagian strategis dalam pelaksanaan program stabilisasi pangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui pendampingan proses distribusi beras di Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau. Permasalahan mitra yang teridentifikasi meliputi ketidakjelasan data penerima bantuan, kesalahan input dokumen, ketidaksesuaian pencatatan dengan stok gudang, kendala teknis penanganan gabah akibat kondisi cuaca, serta antrean masyarakat pada pelaksanaan GPM. Kegiatan dilaksanakan melalui observasi partisipatif, pendampingan administrasi dan operasional distribusi, monitoring stok dan harga, serta evaluasi pelaksanaan penyaluran pangan. Intervensi tim difokuskan pada pendampingan verifikasi data penerima, pemeriksaan dokumen distribusi, sinkronisasi data dengan stok fisik gudang, pendampingan pengemasan dan penyaluran beras, serta monitoring pelaksanaan GPM bersama petugas BULOG. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan berkontribusi terhadap tertibnya proses verifikasi data dan dokumen distribusi, meningkatnya kesesuaian pencatatan dengan kondisi stok fisik, serta lebih terkoordinasinya proses penyaluran beras pada titik distribusi GPM. Pendampingan juga mendukung identifikasi dan penyelesaian kendala operasional secara lebih cepat melalui koordinasi antara petugas distribusi, pengelola gudang, dan pihak terkait. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pendampingan operasional dan administratif dapat mendukung efektivitas pelaksanaan GPM sekaligus memperkuat fungsi BULOG dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras. Model pendampingan tersebut berpotensi diterapkan sebagai strategi penguatan tata kelola distribusi pangan yang lebih tertib, responsif, dan tepat sasaran.

Kata kunci : distribusi beras; Gerakan Pangan Murah; pendampingan; stabilisasi harga; BULOG

Abstract

Price stability and rice availability are essential to ensuring public access to food; therefore, effective distribution, administrative accuracy, and stock control are strategic components of food stabilization programs. This community service program aimed to optimize the implementation of the Affordable Food Movement (Gerakan Pangan Murah/GPM) by providing assistance in rice distribution at the Perum BULOG Lubuk Linggau Branch Office. The identified partner-related challenges included unclear beneficiary data, errors in document entry, discrepancies between administrative records and physical warehouse stocks, technical constraints in paddy handling due to weather conditions, and long queues during GPM implementation. The program was conducted through participatory observation, assistance with administrative and operational distribution processes, stock and price monitoring, and evaluation of food distribution activities. The team's interventions focused on assisting with beneficiary data verification, reviewing distribution documents, reconciling administrative records with physical

warehouse stocks, supporting rice packaging and distribution, and monitoring GPM implementation in collaboration with BULOG personnel. The results indicated that the assistance contributed to more systematic verification of beneficiary data and distribution documents, improved consistency between administrative records and physical stock levels, and better coordination of rice distribution at GPM distribution points. The assistance also facilitated the timely identification and resolution of operational constraints through improved coordination among distribution personnel, warehouse managers, and other relevant stakeholders. Overall, the program demonstrates that operational and administrative assistance can enhance the effectiveness of GPM implementation while strengthening BULOG's role in maintaining rice availability and affordability. This assistance model has the potential to serve as a practical approach to strengthening food distribution governance toward a more systematic, responsive, and well-targeted system.

Keywords: Affordable Food Movement; BULOG; community assistance; food price stabilization; rice distribution

PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang memiliki posisi penting dalam sistem ketahanan pangan Indonesia karena menjadi pangan pokok bagi sebagian besar masyarakat. Perubahan harga beras tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan perdagangan, tetapi juga berimplikasi terhadap daya beli rumah tangga, inflasi, dan kemampuan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ketika harga beras mengalami peningkatan secara signifikan, proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan berpotensi meningkat sehingga mengurangi kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan lainnya. Stabilitas pasokan dan harga beras karena itu menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas sosial ekonomi masyarakat. Rachbini (2018) menjelaskan bahwa gejolak harga komoditas pangan, khususnya beras, dapat memberikan tekanan terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Dalam kerangka kebijakan nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan tanggung jawab negara dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Implementasi kebijakan tersebut salah satunya dilakukan melalui Perum BULOG sebagai badan usaha milik negara yang menjalankan fungsi strategis dalam pengadaan, pengelolaan persediaan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 juga memberikan penugasan kepada Perum BULOG dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Pada tingkat operasional, fungsi stabilisasi tersebut diwujudkan melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah, penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan, serta berbagai bentuk intervensi pasar, termasuk Gerakan Pangan Murah (GPM). Program GPM memiliki posisi penting karena mendekatkan komoditas pangan kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau ketika terjadi tekanan harga di pasar. Dalam konteks kegiatan ini, pelaksanaan GPM mampu menyediakan beras medium dengan harga Rp12.500/kg ketika harga pasar mencapai sekitar Rp16.500/kg. Selisih harga tersebut menunjukkan relevansi intervensi distribusi pangan dalam memperkuat keterjangkauan beras bagi masyarakat. Dengan demikian, efektivitas program stabilisasi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok, tetapi juga oleh ketepatan administrasi, kesiapan logistik, efektivitas distribusi, koordinasi antaraktor, dan kemampuan pelaksana merespons kendala operasional di lapangan.

Permasalahan tersebut juga relevan dengan kondisi yang dihadapi Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau sebagai mitra kegiatan pengabdian. Wilayah ini membutuhkan sistem distribusi yang mampu menjaga kesinambungan pasokan sekaligus

merespons perubahan harga beras secara cepat. Berdasarkan data yang digunakan dalam kegiatan, harga beras di Kota Lubuk Linggau pada triwulan pertama tahun 2024 mengalami peningkatan dari sekitar Rp11.500/kg menjadi Rp14.500/kg. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan intervensi stabilisasi pangan pada tingkat lokal. Dalam pelaksanaannya, fungsi distribusi Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain pasar tradisional, ritel modern, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi, penyaluran SPHP dan bantuan pangan, serta GPM. Namun, hasil identifikasi selama kegiatan menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi masih menghadapi sejumlah persoalan teknis, administratif, dan operasional. Pada aspek administratif ditemukan ketidakjelasan data penerima bantuan, potensi kesalahan input dokumen, serta ketidaksesuaian antara pencatatan administrasi dan kondisi stok fisik gudang. Pada aspek teknis, proses penanganan gabah menghadapi kendala cuaca yang dapat memengaruhi proses penjemuran. Sementara itu, pada tahap distribusi, tingginya antusiasme masyarakat terhadap GPM dapat menimbulkan antrean panjang sehingga membutuhkan pengaturan dan koordinasi yang lebih baik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa stabilisasi pangan pada tingkat daerah bukan hanya persoalan menyediakan beras dengan harga yang lebih rendah, tetapi merupakan proses yang melibatkan akurasi data, pengendalian persediaan, kesiapan logistik, koordinasi antarpelaksana, dan ketepatan penyaluran kepada masyarakat. Distribusi yang tidak dikelola secara efektif berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian stok, hambatan pelayanan, dan berkurangnya efektivitas intervensi harga. Hal ini sejalan dengan pandangan Hastuti dan Widyanti (2023) yang menekankan pentingnya dimensi akses fisik dan ekonomi dalam distribusi pangan. Oleh karena itu, persoalan spesifik mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana mendukung penguatan proses administratif dan operasional distribusi beras agar pelaksanaan GPM dapat berlangsung lebih tertib, responsif, dan tepat sasaran.

Upaya stabilisasi pangan selama ini umumnya menempatkan ketersediaan stok, pengendalian harga, dan distribusi sebagai komponen utama intervensi. Sinergi antara BULOG, pemerintah daerah, pelaku distribusi, dan pemangku kepentingan lainnya juga dipandang penting dalam memastikan efektivitas kebijakan pangan pada tingkat lokal (Damayanti, 2022). Meskipun demikian, terdapat kesenjangan antara ketersediaan instrumen kebijakan stabilisasi pangan dan tantangan implementasinya pada tingkat operasional. Keberadaan stok beras dan program intervensi harga belum secara otomatis menjamin efektivitas penyaluran apabila masih terdapat persoalan pada validitas data penerima, ketepatan dokumen, sinkronisasi stok, kesiapan distribusi, dan koordinasi pelayanan di titik GPM. Pada titik inilah kegiatan pengabdian memiliki posisi yang berbeda dari sekadar observasi terhadap aktivitas BULOG. Kegiatan diarahkan pada pendampingan operasional dan administratif secara partisipatif dengan melibatkan tim dalam verifikasi data penerima, pemeriksaan dokumen distribusi, sinkronisasi data administrasi dengan stok fisik, monitoring stok dan harga, pendampingan pengemasan dan penyaluran beras, serta monitoring pelaksanaan GPM bersama petugas BULOG. Kebaruan praktis (practical novelty) kegiatan terletak pada integrasi pendampingan pada tiga tahapan yang saling berhubungan, yaitu akurasi administrasi-pengendalian stok-efektivitas distribusi, bukan hanya keterlibatan pada satu aktivitas penyaluran. Pendekatan tersebut menempatkan kegiatan pengabdian sebagai proses kolaboratif untuk mendukung penyelesaian persoalan

aktual mitra sekaligus menghasilkan pengalaman praktik yang dapat direplikasi dalam penguatan tata kelola distribusi pangan. Pendekatan ini juga relevan dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 2: *Zero Hunger*, karena mendukung keterjangkauan dan akses masyarakat terhadap pangan pokok, serta SDG 12: *Responsible Consumption and Production*, terutama dalam konteks penguatan tata kelola rantai pasok dan distribusi pangan. Dengan demikian, kontribusi kegiatan tidak hanya terletak pada dukungan terhadap pelaksanaan GPM, tetapi juga pada pengembangan model pendampingan administratif dan operasional yang menghubungkan aspek ketepatan data, pengelolaan persediaan, dan distribusi pangan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan kesenjangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mendukung optimalisasi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah melalui pendampingan distribusi beras di Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau. Secara khusus, kegiatan diarahkan untuk mendukung verifikasi data dan dokumen distribusi, meningkatkan kesesuaian antara pencatatan administrasi dan kondisi stok fisik, membantu proses pengemasan dan penyaluran beras, serta memperkuat monitoring dan koordinasi selama pelaksanaan GPM. Kegiatan ini diharapkan memberikan kontribusi pada dua aspek. Secara praktis, pendampingan diharapkan membantu mitra menciptakan proses distribusi yang lebih tertib, responsif, terkoordinasi, dan tepat sasaran sehingga fungsi stabilisasi harga dan keterjangkauan pangan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Secara akademik, kegiatan memberikan pengalaman empiris mengenai penerapan model pendampingan yang mengintegrasikan administrasi distribusi, pengendalian stok, dan implementasi GPM pada tingkat lokal. Model tersebut dapat menjadi dasar pengembangan kegiatan pengabdian berikutnya pada institusi atau wilayah dengan karakteristik permasalahan distribusi pangan yang serupa. Dengan orientasi tersebut, kegiatan tidak ditempatkan sebagai praktik lapangan yang hanya memberikan pengalaman kepada mahasiswa, tetapi sebagai intervensi pengabdian berbasis kebutuhan mitra yang melibatkan identifikasi masalah, pendampingan proses, monitoring, dan evaluasi terhadap perubahan yang terjadi selama pelaksanaan program. Pada akhirnya, penguatan tata kelola distribusi melalui pendampingan tersebut diharapkan turut mendukung kemampuan Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau dalam menjalankan fungsi stabilisasi pasokan dan harga serta memperkuat akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang terjangkau.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau, Jalan Yos Sudarso No. 9, Kelurahan Taba Pingin, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, pada 14 Juli–30 Agustus 2025. Kegiatan menggunakan pendekatan pendampingan partisipatif (*participatory assistance*) yang menempatkan tim pengabdian dan mitra sebagai pihak yang terlibat secara kolaboratif dalam mengidentifikasi permasalahan, mendampingi proses administrasi dan operasional, serta mengevaluasi pelaksanaan distribusi beras. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan mitra tidak hanya berkaitan dengan proses penyaluran beras, tetapi juga mencakup ketepatan data penerima, administrasi distribusi, kesesuaian pencatatan dengan stok fisik, dan koordinasi pada pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi empat tahapan, yaitu (1) identifikasi dan pemetaan masalah, (2) pendampingan administrasi dan pengendalian stok, (3) pendampingan operasional distribusi dan pelaksanaan GPM, serta (4) monitoring dan evaluasi. Pada tahap identifikasi, tim melakukan observasi partisipatif dan diskusi dengan petugas untuk mengidentifikasi

alur distribusi serta kendala yang terjadi. Tahap pendampingan administrasi dilakukan melalui verifikasi data penerima, pemeriksaan dokumen distribusi, pencatatan stok, dan pencocokan catatan administrasi dengan kondisi fisik persediaan. Tahap operasional mencakup pendampingan pengemasan, pemantauan harga, penyiapan distribusi, dan penyaluran beras pada titik GPM. Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi keterlaksanaan kegiatan, kendala yang muncul, tindakan korektif, serta perubahan proses setelah dilakukan pendampingan. Dengan desain tersebut, kegiatan tidak ditempatkan sebagai aktivitas observasi atau praktik kerja mahasiswa semata, tetapi sebagai intervensi pendampingan yang diarahkan untuk mendukung tata kelola distribusi beras yang lebih tertib dan responsif.

Mitra sasaran kegiatan adalah Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau, khususnya unit dan petugas yang berkaitan dengan administrasi, pengelolaan persediaan, pergudangan, serta distribusi beras. Penerima manfaat tidak langsung adalah masyarakat yang memperoleh akses terhadap beras melalui program stabilisasi pangan, terutama GPM. Kegiatan melibatkan tim pengabdian/mahasiswa dan petugas Perum BULOG dengan pembagian peran sesuai fungsi masing-masing. Petugas BULOG berperan sebagai mitra yang memberikan informasi mengenai prosedur operasional, data distribusi dan persediaan, mekanisme penyaluran, serta permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Tim pengabdian berperan dalam melakukan observasi partisipatif, membantu verifikasi dan pencatatan data, mencocokkan dokumen dengan stok fisik, mendampingi pengemasan dan distribusi, memonitor pelaksanaan GPM, serta mendokumentasikan kendala dan tindakan penyelesaiannya. Pendampingan dilaksanakan pada proses yang secara langsung berkaitan dengan efektivitas distribusi, mulai dari kesiapan data dan stok hingga penyaluran kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan GPM, koordinasi dilakukan bersama petugas BULOG dan pihak terkait untuk mendukung ketertiban proses penyaluran, terutama ketika terjadi peningkatan antrean masyarakat. Keterlibatan langsung mitra dalam setiap tahapan dimaksudkan agar penyelesaian masalah tidak ditentukan secara sepihak oleh tim pengabdian, melainkan disesuaikan dengan prosedur kerja, kewenangan, dan kondisi operasional BULOG. Pola tersebut juga memungkinkan tim memperoleh umpan balik langsung terhadap bentuk pendampingan yang diberikan sehingga tindakan korektif dapat dilakukan ketika ditemukan ketidaksesuaian data, dokumen, stok, maupun kendala distribusi.

Luaran kegiatan difokuskan pada perbaikan proses administratif dan operasional distribusi beras, bukan semata-mata pada produk fisik. Luaran proses meliputi terverifikasinya data dan dokumen distribusi, tersinkronisasinya pencatatan administrasi dengan stok fisik, terdokumentasinya proses monitoring stok dan harga, serta terlaksananya pendampingan pengemasan dan distribusi beras pada kegiatan GPM. Pendampingan juga menghasilkan dokumentasi mengenai permasalahan operasional dan tindakan korektif yang diterapkan bersama mitra. Pada aspek administrasi, tim mendukung pemeriksaan kembali data penerima dan dokumen penyaluran untuk mengurangi potensi ketidaksesuaian informasi. Pada aspek pengendalian persediaan, pencatatan administrasi dibandingkan dengan kondisi stok fisik sebagai mekanisme pengecekan kesesuaian data. Sementara itu, pada aspek distribusi, tim terlibat dalam persiapan dan monitoring proses penyaluran agar alur pelayanan dapat berlangsung lebih terkoordinasi. Dengan demikian, transfer pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan ini berlangsung secara dua arah.

Tim memperoleh pemahaman mengenai tata kelola distribusi pangan, sedangkan mitra memperoleh dukungan tenaga dan pendampingan dalam proses verifikasi, monitoring, dokumentasi, serta identifikasi kendala operasional. Luaran tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kontribusi pendampingan terhadap pelaksanaan GPM dan distribusi beras di Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan lembar observasi, catatan kegiatan (*field notes*), dokumentasi, dokumen administrasi distribusi, catatan stok, data harga, dan hasil diskusi dengan petugas terkait. Observasi partisipatif digunakan untuk mencatat tahapan kegiatan, pola koordinasi, kendala teknis dan administratif, serta proses distribusi pada titik penyaluran. Pemeriksaan dokumen digunakan untuk melihat kesesuaian antara informasi administratif dengan proses operasional dan kondisi stok fisik. Dokumentasi berupa foto dan catatan kegiatan digunakan sebagai bukti keterlaksanaan pendampingan, sedangkan diskusi dengan petugas digunakan untuk memperoleh klarifikasi terhadap permasalahan yang ditemukan dan tindakan korektif yang dilakukan. Evaluasi keberhasilan kegiatan menggunakan indikator proses dan hasil yang dapat diverifikasi dari data mitra. Indikator tersebut meliputi (1) ketertiban verifikasi data penerima, (2) kesesuaian dokumen distribusi, (3) kesesuaian pencatatan administrasi dengan stok fisik, (4) keterlaksanaan pengemasan dan penyaluran beras, (5) keteraturan proses distribusi pada GPM, dan (6) kemampuan mengidentifikasi serta menindaklanjuti kendala operasional. Karena kegiatan belum menggunakan instrumen kompetensi terstandar maupun desain pre-test-post-test, evaluasi tidak diarahkan untuk mengklaim peningkatan kompetensi peserta secara kuantitatif, melainkan untuk menilai perubahan dan keterlaksanaan proses berdasarkan bukti administrasi, observasi, serta dokumentasi lapangan.

Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif operasional. Data kualitatif dari observasi, catatan lapangan, dokumentasi, dan diskusi dengan petugas dianalisis melalui tahapan pengelompokan data berdasarkan jenis permasalahan, identifikasi pola kendala, interpretasi tindakan pendampingan, dan penarikan kesimpulan mengenai perubahan proses yang terjadi. Permasalahan dikelompokkan ke dalam aspek administratif, pengelolaan persediaan, teknis operasional, dan distribusi GPM agar hubungan antara masalah, bentuk pendampingan, dan hasil kegiatan dapat ditelusuri secara sistematis. Data kuantitatif yang tersedia, seperti jumlah atau volume distribusi, harga beras, data persediaan, dan data operasional lainnya, dianalisis secara deskriptif melalui perbandingan nilai dan kecenderungan sesuai ketersediaan data mitra. Keabsahan informasi diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil observasi dengan dokumen administrasi, catatan stok, dokumentasi, dan keterangan petugas BULOG. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menilai ketercapaian indikator kegiatan serta mengidentifikasi praktik yang dapat dipertahankan atau diperbaiki dalam pelaksanaan distribusi berikutnya. Pendekatan tersebut memungkinkan evaluasi kegiatan tidak hanya menjelaskan aktivitas yang dilakukan, tetapi juga memperlihatkan hubungan yang sistematis antara permasalahan mitra-intervensi pendampingan-indikator ketercapaian-hasil kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian di Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau menghasilkan temuan pada tiga dimensi utama, yaitu: (1) penguatan distribusi dan aksesibilitas beras melalui Gerakan Pangan Murah (GPM); (2) penguatan administrasi, verifikasi data, dan pengendalian stok; serta (3) penguatan koordinasi operasional dalam mengatasi kendala distribusi pangan. Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas stabilisasi pangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya stok yang tersedia,

tetapi juga oleh kemampuan mengintegrasikan ketepatan administrasi, kesiapan persediaan, distribusi, dan koordinasi lintas sektor. Selama pendampingan, tim terlibat pada monitoring penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), verifikasi Rumah Pangan Kita (RPK) dan pengecer, distribusi Bantuan Pangan (Banpang), monitoring pengadaan dan kualitas gabah, stock opname, serta pelaksanaan GPM. Hasil kegiatan kemudian dianalisis berdasarkan perubahan proses yang terjadi dan kontribusi pendampingan terhadap penyelesaian masalah mitra.

Penguatan Aksesibilitas Pangan melalui Pendampingan Gerakan Pangan Murah

Temuan utama kegiatan adalah terlaksananya distribusi beras melalui GPM pada lima titik di wilayah kerja Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau yang meliputi Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Tim pengabdian terlibat dalam pendampingan persiapan, pengemasan, monitoring, dan proses penyaluran beras bersama petugas BULOG serta pemangku kepentingan terkait. Berdasarkan data kegiatan, jumlah beras yang dialokasikan pada lima titik GPM mencapai 240 ton, dengan distribusi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Beras pada Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah

No.	Lokasi GPM	Kuantum	Proporsi
1	Kodim 0406	20 ton	8,3%
2	Polres Lubuk Linggau	40 ton	16,7%
3	Polres Musi Rawas	80 ton	33,3%
4	Polres Musi Rawas Utara	60 ton	25,0%
5	Kantor BULOG Taba Pingin	40 ton	16,7%
Total		240 ton	100%

Sumber: Data kegiatan pengabdian, 2025.

Tabel 1 menunjukkan bahwa volume distribusi terbesar terdapat pada titik Polres Musi Rawas, yaitu 80 ton atau sekitar 33,3% dari total kuantum, diikuti Polres Musi Rawas Utara sebesar 60 ton atau 25%. Sementara itu, masing-masing 40 ton dialokasikan melalui Polres Lubuk Linggau dan Kantor BULOG Taba Pingin, sedangkan 20 ton didistribusikan melalui Kodim 0406. Distribusi pada beberapa titik tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan lintas wilayah dan lintas institusi dalam mendekatkan komoditas pangan kepada masyarakat. Pelibatan kepolisian, TNI, pemerintah daerah, dan BULOG juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan GPM merupakan aktivitas kolaboratif yang membutuhkan dukungan logistik sekaligus pengendalian pelayanan di lokasi distribusi.

Aspek lain yang penting adalah keterjangkauan harga. Dalam kegiatan GPM, beras medium disalurkan dengan harga Rp12.500/kg, sedangkan informasi lapangan yang digunakan dalam kegiatan menunjukkan harga beras medium di pasar dapat mencapai sekitar Rp16.500/kg. Dengan demikian, terdapat selisih nominal sebesar Rp4.000/kg antara harga beras pada GPM dan harga pasar yang teridentifikasi pada periode kegiatan. Kondisi tersebut menunjukkan manfaat langsung GPM dari perspektif keterjangkauan pada titik pelaksanaan, karena masyarakat memperoleh alternatif pembelian beras dengan

harga lebih rendah. Namun, temuan ini tidak dapat langsung ditafsirkan bahwa GPM telah menurunkan harga pasar secara keseluruhan dari Rp16.500/kg menjadi Rp12.500/kg. Pembuktian dampak terhadap stabilitas harga regional memerlukan data runtut waktu harga sebelum, selama, dan setelah GPM serta perbandingan dengan wilayah yang tidak memperoleh intervensi. Oleh karena itu, berdasarkan data yang tersedia, kontribusi yang paling dapat dikonfirmasi adalah peningkatan akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang lebih terjangkau pada titik pelaksanaan GPM.

Temuan tersebut memiliki relevansi dengan prinsip ketahanan pangan yang tidak hanya menekankan aspek ketersediaan (availability), tetapi juga keterjangkauan dan akses (accessibility). Dalam konteks ini, keberadaan stok di gudang belum menghasilkan manfaat langsung apabila komoditas tersebut tidak dapat disalurkan kepada masyarakat pada lokasi, waktu, dan harga yang sesuai. Pendampingan GPM menunjukkan bahwa penguatan distribusi menjadi jembatan antara ketersediaan stok BULOG dan akses ekonomi masyarakat terhadap beras. Temuan tersebut sekaligus memperlihatkan kontribusi kegiatan terhadap Sustainable Development Goal (SDG) 2: Zero Hunger, khususnya dalam mendukung akses masyarakat terhadap pangan pokok yang lebih terjangkau.



Gambar 1. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada beberapa wilayah kerja Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau

Penguatan Ketepatan Distribusi SPHP dan Bantuan Pangan

Selain GPM, pendampingan dilakukan pada proses monitoring penyaluran beras SPHP melalui RPK dan pengecer. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengendalian distribusi SPHP memerlukan monitoring pada aspek harga dan ketersediaan stok. Pendampingan monitoring dilakukan untuk memastikan bahwa beras SPHP tersedia pada saluran distribusi yang ditentukan dan dijual sesuai dengan ketentuan harga yang berlaku dalam kegiatan. Proses tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas program stabilisasi

tidak berhenti pada tahap penyaluran beras dari gudang, tetapi memerlukan pengawasan sampai pada saluran yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Pendampingan juga dilakukan pada proses penyaluran Bantuan Pangan. Pada tahap ini ditemukan persoalan administratif berupa kualitas foto identitas penerima yang kurang jelas, kesalahan input data, dan dokumen yang membutuhkan pembaruan. Temuan tersebut penting karena akurasi data penerima merupakan prasyarat distribusi bantuan yang tepat sasaran. Ketidaksesuaian data berpotensi menyebabkan keterlambatan verifikasi dan memengaruhi ketertiban administrasi penyaluran.

Intervensi yang dilakukan berupa pendampingan verifikasi ulang data penerima dan pemeriksaan dokumen sebelum proses administrasi dilanjutkan. Ketika ditemukan data yang tidak sesuai atau dokumen yang kurang jelas, informasi dikonfirmasi kembali dan dilakukan perbaikan bersama petugas yang memiliki kewenangan. Hasil pendampingan menunjukkan bahwa dokumen bermasalah dapat diidentifikasi sebelum tahapan berikutnya sehingga proses koreksi dapat dilakukan lebih awal. Dengan demikian, kontribusi tim tidak terletak pada pengambilan keputusan mengenai penerima bantuan—yang tetap menjadi kewenangan mitra—tetapi pada penguatan proses pengecekan dan identifikasi ketidaksesuaian administrasi.

Temuan tersebut menghasilkan lesson learned bahwa ketepatan sasaran distribusi pangan membutuhkan ketepatan data. Dalam skala distribusi yang besar, kesalahan sederhana pada identitas, dokumen, atau input data dapat berkembang menjadi hambatan pelayanan. Praktik verifikasi berlapis sebelum penyaluran karena itu dapat dipertimbangkan sebagai salah satu mekanisme pengendalian administrasi. Digitalisasi dan integrasi basis data penerima juga berpotensi menjadi pengembangan berikutnya, tetapi penerapannya memerlukan mekanisme validasi, perlindungan data pribadi, dan pembagian kewenangan yang jelas.

Sinkronisasi Stok dan Penguatan Pengendalian Persediaan

Hasil pendampingan berikutnya berkaitan dengan pengendalian persediaan beras dan gabah. Kegiatan stock opname menemukan adanya perbedaan kecil antara pencatatan administrasi dan kondisi stok fisik yang antara lain berkaitan dengan keterlambatan pembaruan pencatatan. Meskipun data kuantitatif mengenai besarnya selisih belum tersedia, temuan ini menunjukkan bahwa sinkronisasi antara pergerakan fisik komoditas dan pembaruan data administrasi merupakan titik penting dalam pengelolaan persediaan.

Tindakan yang dilakukan adalah membantu pencocokan ulang catatan dengan stok fisik serta mengidentifikasi dokumen yang perlu diperbarui. Pendampingan tersebut menghasilkan proses rekonsiliasi yang lebih sistematis karena perbedaan tidak hanya dicatat sebagai masalah, tetapi ditelusuri kembali melalui dokumen dan kondisi aktual persediaan. Secara operasional, proses ini penting untuk mendukung kesiapan data persediaan yang digunakan dalam perencanaan penyaluran berikutnya.

Pengendalian stok juga berkaitan dengan aspek hulu rantai pasok. Tim mendampingi monitoring pengadaan gabah dari petani dan kualitas hasil penggilingan pada mitra BULOG. Salah satu kendala yang ditemukan adalah kondisi cuaca yang memengaruhi proses penjemuran gabah. Penanganan dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan periode cuaca panas untuk penjemuran dan melakukan perlindungan ketika kondisi cuaca berubah. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengendalian

persediaan pangan tidak hanya berkaitan dengan kuantitas, tetapi juga kualitas komoditas sebelum masuk atau selama berada dalam rantai pasok.

Dari perspektif pemberdayaan mitra, kegiatan tersebut menunjukkan keterhubungan antara serapan gabah–pengendalian kualitas–pengelolaan stok–distribusi. Keempat komponen tidak dapat dikelola secara terpisah apabila tujuan akhirnya adalah menjaga kontinuitas pasokan. Dengan demikian, salah satu best practice yang diperoleh adalah pentingnya menggunakan pendekatan hulu-hilir dalam pendampingan distribusi pangan. Penguatan pada tahap distribusi perlu disertai kesiapan persediaan dan pengendalian mutu sehingga intervensi pasar tidak terganggu oleh ketidaktersediaan atau ketidaksesuaian kualitas komoditas.

Penguatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pelaksanaan GPM

Temuan penting lainnya adalah tingginya antusiasme masyarakat pada pelaksanaan GPM yang pada beberapa kondisi menimbulkan antrean panjang dan berpotensi mengganggu ketertiban distribusi. Kondisi tersebut menunjukkan paradoks operasional: tingginya partisipasi masyarakat dapat menjadi indikator kuatnya kebutuhan terhadap pangan terjangkau, tetapi pada saat bersamaan meningkatkan kompleksitas pengelolaan titik distribusi.

Respons terhadap permasalahan tersebut dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara BULOG dengan aparat keamanan dan pihak terkait, termasuk Polres, Polsek, dan TNI. Dukungan tersebut membantu pengaturan alur masyarakat dan menjaga keamanan selama proses distribusi. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan, keberhasilan GPM karena itu tidak hanya bergantung pada ketersediaan beras dan harga jual, tetapi juga pada kesiapan lokasi, pengaturan antrean, koordinasi petugas, dan mekanisme pelayanan kepada masyarakat.

Praktik kolaborasi tersebut dapat diposisikan sebagai best practice dalam penyelenggaraan distribusi pangan skala besar. Model kolaborasi dapat dirumuskan sebagai BULOG–pemerintah daerah–aparat keamanan–saluran distribusi–masyarakat, dengan fungsi yang saling melengkapi. BULOG bertanggung jawab terhadap kesiapan komoditas dan mekanisme penyaluran, pemerintah daerah mendukung koordinasi wilayah dan masyarakat sasaran, sedangkan aparat keamanan mendukung ketertiban pada titik distribusi. Pendekatan lintas sektor tersebut relevan dengan SDG 17: Partnerships for the Goals, yang menekankan pentingnya kemitraan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Integrasi Hasil Pendampingan: Model Penguatan Distribusi Pangan

Apabila keseluruhan hasil dianalisis secara terpadu, kegiatan menunjukkan bahwa persoalan distribusi pangan memiliki setidaknya empat titik kritis, yaitu akurasi data, kesiapan stok, kelancaran distribusi, dan koordinasi lintas sektor. Keempat aspek tersebut saling berhubungan. Data yang akurat diperlukan agar distribusi tepat sasaran; stok yang terkontrol diperlukan agar program dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan; mekanisme distribusi yang tertib diperlukan agar komoditas sampai kepada masyarakat; sedangkan koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengatasi kompleksitas operasional di lapangan.

Berdasarkan temuan tersebut, praktik pendampingan yang diterapkan dalam kegiatan ini dapat dirumuskan menjadi model Verifikasi–Sinkronisasi–Distribusi–Monitoring (VSDM). Pada tahap verifikasi, data penerima dan dokumen distribusi diperiksa untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian. Tahap sinkronisasi dilakukan dengan mencocokkan catatan administrasi dan kondisi persediaan. Tahap distribusi mencakup

pendampingan kesiapan komoditas, pengemasan, dan penyaluran melalui SPHP, Banpang, maupun GPM. Tahap monitoring dilakukan terhadap harga, stok, proses pelayanan, dan kendala yang muncul selama pelaksanaan. Model ini merupakan formulasi praktis berdasarkan pengalaman kegiatan dan masih memerlukan pengujian pada lokasi serta periode yang lebih luas sebelum dapat dinyatakan sebagai model yang terstandarisasi.

Tabel 2. Temuan, Intervensi, dan Hasil Pendampingan

Permasalahan	Intervensi/ Pendampingan	Hasil Teridentifikasi	yang Implikasi
Data penerima/dokumen kurang sesuai	Verifikasi ulang dan pemeriksaan dokumen	Ketidaksesuaian diidentifikasi dan diperbaiki	dapat Mendukung dan ketertiban administrasi
Perbedaan catatan dan stok fisik	Pencocokan dan sinkronisasi data	Data dan kondisi fisik dapat direkonsiliasi	Memperkuat pengendalian persediaan
Kendala kualitas gabah akibat cuaca	Monitoring dan penanganan adaptif	Penanganan disesuaikan kondisi cuaca	Mendukung dengan pemeliharaan kualitas
Antrean GPM	Koordinasi dengan BULOG dan aparat	Distribusi dilaksanakan dengan pengendalian ketertiban	dapat dengan Memperkuat koordinasi operasional
Keterjangkauan beras	Distribusi GPM pada lima titik	240 ton dialokasikan; harga Rp12.500/kg	Memperluas akses terhadap beras terjangkau
Monitoring SPHP	Monitoring RPK/pengecer dan harga	Saluran distribusi dan harga dapat dipantau	Mendukung fungsi stabilisasi

Sumber: Hasil kegiatan pengabdian, 2025.

Model tersebut menjadi nilai tambah kegiatan karena pendampingan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi menghasilkan pemahaman mengenai mekanisme pengendalian distribusi yang dapat diterapkan secara berulang. Dalam konteks pengabdian, kontribusi tim terletak pada dukungan terhadap proses verifikasi, rekonsiliasi, monitoring, dokumentasi, dan koordinasi, sedangkan keputusan operasional tetap berada pada kewenangan Perum BULOG dan pemangku kepentingan terkait. Posisi tersebut penting untuk membedakan kontribusi program pengabdian dari fungsi reguler yang memang telah dijalankan oleh mitra.

Kontribusi terhadap SDGs dan Keberlanjutan Program

Secara substantif, hasil pengabdian berkaitan dengan beberapa agenda SDGs. Kontribusi utama terdapat pada SDG 2 (Zero Hunger) melalui dukungan terhadap akses masyarakat pada pangan pokok yang lebih terjangkau dan penguatan mekanisme

distribusi. Pengawasan kualitas gabah dan keterhubungan dengan penyerapan hasil petani juga berkaitan dengan keberlanjutan sistem pangan lokal. Sementara itu, koordinasi antara BULOG, pemerintah daerah, kepolisian, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya mencerminkan implementasi SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi lintas institusi dalam mendukung akses pangan masyarakat.

Keberlanjutan hasil program membutuhkan perbaikan pada beberapa aspek. Pertama, verifikasi administrasi perlu diperkuat melalui sistem pencatatan yang lebih terintegrasi untuk mengurangi potensi kesalahan input dan mempercepat rekonsiliasi data. Kedua, monitoring RPK dan saluran SPHP perlu dilakukan secara konsisten untuk memastikan keterjangkauan harga dan ketersediaan komoditas. Ketiga, penyelenggaraan GPM dengan permintaan tinggi membutuhkan perencanaan antrean, pembagian tugas, dan koordinasi keamanan sejak sebelum kegiatan. Keempat, pembinaan terhadap mitra penggilingan perlu dipertahankan untuk mendukung kontinuitas kualitas dan pasokan beras. Rangkaian perbaikan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan stabilisasi pangan membutuhkan integrasi aspek digital, administratif, logistik, dan kelembagaan.

Keterbatasan Kegiatan dan Implikasi Pengembangan

Meskipun menunjukkan beberapa capaian operasional, hasil kegiatan perlu ditafsirkan dengan memperhatikan keterbatasannya. Pertama, kegiatan dilaksanakan dalam periode 14 Juli–30 Agustus 2025 sehingga belum memungkinkan evaluasi dampak jangka panjang. Kedua, data kuantitatif sebelum dan sesudah pendampingan mengenai tingkat kesalahan dokumen, persentase kesesuaian stok, waktu antrean, jumlah penerima manfaat, dan perubahan harga pasar belum tersedia secara lengkap. Oleh karena itu, kegiatan belum dapat menyimpulkan secara kausal bahwa pendampingan menyebabkan peningkatan efisiensi administrasi atau penurunan harga beras pada tingkat wilayah. Ketiga, distribusi sebanyak 240 ton merupakan output pelaksanaan GPM, sehingga tidak tepat secara otomatis diperlakukan sebagai dampak dari pendampingan tim. Kontribusi tim lebih tepat ditempatkan pada dukungan terhadap kesiapan, monitoring, administrasi, dan keteraturan proses distribusi.

Kegiatan berikutnya perlu menggunakan evaluasi before–after dengan indikator yang ditetapkan sejak awal, seperti persentase kesalahan dokumen, kesesuaian stok fisik dan sistem, waktu rata-rata pelayanan, jumlah penerima, kuantum beras yang tersalurkan, serta perkembangan harga beras sebelum dan setelah intervensi. Survei singkat kepada penerima juga dapat digunakan untuk mengukur keterjangkauan, kemudahan akses, dan kepuasan terhadap pelayanan GPM. Penggunaan indikator tersebut akan memungkinkan efektivitas model Verifikasi–Sinkronisasi–Distribusi–Monitoring (VSDM) diuji secara lebih objektif dan menghasilkan bukti empiris yang lebih kuat.

Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan distribusi beras pada Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau tidak hanya berkaitan dengan penyaluran komoditas, tetapi mencakup penguatan proses dari aspek administrasi, persediaan, distribusi, hingga koordinasi lintas sektor. Distribusi GPM sebesar 240 ton pada lima titik, penyediaan beras dengan harga Rp12.500/kg pada kegiatan GPM, verifikasi administrasi penerima, rekonsiliasi stok, serta koordinasi dalam pengendalian antrean menjadi temuan utama kegiatan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas intervensi pangan membutuhkan pendekatan terintegrasi antara ketepatan data, kesiapan stok, keterjangkauan pangan, dan kolaborasi kelembagaan. Pendekatan tersebut berpotensi dikembangkan sebagai praktik pendampingan untuk memperkuat tata kelola distribusi pangan pada wilayah lain dengan karakteristik permasalahan yang serupa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau menunjukkan bahwa pendampingan pada aspek administrasi, pengendalian stok, distribusi, dan monitoring Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat mendukung pelaksanaan program stabilisasi pangan secara lebih tertib dan terkoordinasi. Capaian utama kegiatan terlihat dari keterlibatan tim dalam verifikasi data penerima, pemeriksaan dokumen distribusi, sinkronisasi pencatatan dengan stok fisik, monitoring penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan, serta pendampingan pelaksanaan GPM pada lima titik distribusi dengan total kuantum 240 ton. Pelaksanaan GPM juga memberikan akses kepada masyarakat terhadap beras dengan harga Rp12.500/kg pada saat harga beras medium di pasar teridentifikasi berada pada kisaran Rp16.500/kg, sehingga program ini memberikan manfaat langsung dari sisi keterjangkauan pangan pada titik pelaksanaan. Hasil kegiatan menegaskan bahwa efektivitas stabilisasi pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan komoditas, tetapi juga oleh ketepatan data, kesesuaian administrasi dan stok, kelancaran distribusi, serta koordinasi lintas sektor. Secara praktis, kegiatan ini menghasilkan pola pendampingan yang dapat dirumuskan dalam tahapan verifikasi, sinkronisasi, distribusi, dan monitoring sebagai pendekatan untuk memperkuat tata kelola distribusi pangan. Kontribusi kegiatan juga relevan dengan pencapaian SDG 2 (Zero Hunger) melalui dukungan terhadap akses pangan yang lebih terjangkau dan SDG 17 (Partnerships for the Goals) melalui kolaborasi antara BULOG, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, hasil kegiatan masih terbatas pada capaian proses dan output operasional sehingga belum dapat digunakan untuk menyimpulkan dampak kausal terhadap stabilitas harga beras pada tingkat wilayah.

Pengembangan program selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan sistem evaluasi berbasis indikator yang lebih terukur. Perum BULOG Kantor Cabang Lubuk Linggau disarankan meningkatkan integrasi dan digitalisasi data penerima bantuan, pencatatan stok, serta dokumen distribusi untuk meminimalkan kesalahan input dan mempercepat proses rekonsiliasi data. Monitoring terhadap RPK, pengecer SPHP, serta titik distribusi GPM juga perlu dilakukan secara konsisten agar keterjangkauan harga dan ketersediaan beras dapat terpantau secara berkelanjutan. Pada pelaksanaan GPM, perencanaan teknis sebaiknya mencakup pengaturan antrean, pembagian tugas, mekanisme pelayanan, dan koordinasi keamanan sejak tahap persiapan untuk mengantisipasi tingginya antusiasme masyarakat. Kegiatan pengabdian berikutnya juga disarankan menggunakan desain evaluasi before-after dengan indikator seperti tingkat kesalahan administrasi, kesesuaian stok fisik dan sistem, jumlah penerima manfaat, waktu pelayanan, volume distribusi, serta perkembangan harga sebelum dan sesudah intervensi. Selain itu, survei kepada penerima manfaat dapat digunakan untuk mengukur keterjangkauan, aksesibilitas, dan kepuasan terhadap program. Dengan evaluasi yang lebih sistematis, model pendampingan verifikasi-sinkronisasi-distribusi-monitoring dapat diuji pada wilayah kerja yang lebih luas dan dikembangkan sebagai praktik penguatan tata kelola distribusi pangan yang lebih efektif, responsif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan Nasional. (2023). Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras. Jakarta.

- Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lubuk Linggau. (2024). Perkembangan Harga Komoditas Pangan Strategis di Kota Lubuk Linggau Tahun 2024. BPS Kota Lubuk Linggau.
- Bulog Regional Sumatera Selatan. (2024). Laporan Kegiatan Penyaluran Beras SPHP di Lubuk Linggau. Palembang: Bulog Kanwil Sumsel.
- FAO. (2015). The State of Food Insecurity in the World. Rome: Food and Agriculture Organization.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Tahunan Stabilitas Harga Pangan Nasional. Jakarta: Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Strategi Nasional Ketahanan Pangan. Jakarta: Kementan.
- Laporan Kinerja Perum Bulog. (2023). Penyaluran dan Stabilisasi Harga Beras. Jakarta: Perum Bulog.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.
- Perum BULOG. (2023). Profil dan Kinerja BULOG dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras. Jakarta: Perum BULOG.
- Rachbini, D. J. (2018). Ekonomi Politik Harga Pangan di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2015). Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector (8th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Saragih, B. (2021). Pangan dan Tantangan Distribusi di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.